**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN LUAS WILAYAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL.**

**(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2018)**

**THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, LOCAL REVENUES, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND WIDE OF REGION TO CAPITAL EXPENDITURE.**

**(Empirical Study of Regency and City on Province of West Java on 2017-2018 periode)**

**Antika Widya Sundari**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**Antika.widya12@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017 – 2018. Memiliki sampel sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah bepengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

**Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah, Belanja Modal**

***Abstract***

*The aims of this research are to know the effect of Economic Growth, Local Revenues, General Allocation Funds and Wide of Region to Capital Expenditure in province of West Java on 2017-2018.*

*The method of this research is quantitative. Population in this research are resulted in Government Finance Report 2017- 2018. The sample are 27 Regency/ City in the province of West Java. The analysis tool used is Multiple Regression linear Analysis Using SPSS program.*

*The results of this study indicate that the economic growth and Local Revenues are affect the capital expenditure. While the general allocation funds and Wide of Region have no effect on capital expenditure.*

***Keywords: Economic Growth, Local Revenues, General Allocation Funds, Wide of Region, Capital Expenditure***

**PENDAHULUAN**

UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi disuatu daerah karena memberikan kebebasan untuk merancang dan mengelola keuangannya secara mandiri dan membuat kebijakan yang dapat bepengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Mudrajat Kuncoro, 2004).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut Mahmudi (2010:18) Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU merupakan dana yang didapatkan melalui penerimaan dalam negeri diberikan dari pusat ke pemda dengan harapan keadilan finansial antar daerah yang digunakan membiayai keperluan belanja untuk meningkatkan pembangunan didaerah. Salah satu tujuan penting pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Halim, 2014:118). Terbukti bahwa Dana Alokasi Umum dapat dijadikan penyeimbang dalam pembagian dana daerah yang sesuai dengan kemampuan daerah yang kurang ataupun kemampuan keuangan daerah yang tidak semua dimiliki oleh daerah yang tersebar di Indonesia.

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Pada prinsipnya, Belanja Modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas public.

Menurut Putra (2017) Daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas justru akan menghabiskan biaya pembangunan yang cukup besar. Jika suatu daerah tersebut ingin maju dan sejahtera, maka pemerintah harus menyediakan biaya anggaran yang cukup besar dalam pembangunan tersebut. Untuk mewujudkan daerah yang sejahtera maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan belanja modalnya. Luas wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional kecil (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk menguji lebih lanjut masalah tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Luas Wilayah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2017 – 2018).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018? 2) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018? 3) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018? 4) Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja M\odal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. 2) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. 3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. 4) Untuk mengetahui pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

**TELAAH PUSTAKA**

**Belanja Modal**

Menurut Sudika dan Budiarta (2017) Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemda sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Putra,2017). Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

**Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sri Ayem dan Dessy Dyah (2018). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak (Siswiyanti,2015).

**Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Ginting, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika tingkat PAD suatu daerah meningkat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut meningkat. (Rosita dan Manggar 2019).

**Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Luas Wilayah**

Menurut Putra (2017) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Bersaran oraganisasi perangkat sebuah daerah mempertimbangkan faktor kebutuhan daerah, keuangan daerah, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berhubungan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Maka dari itu kebutuhan perangkat organisasi daerah untuk setiap daerah tidak senantiasa sama. Indikator pengukuran untuk luas wilayah yaitu menggunakan satuan km2.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Populasi yang digunakan sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2018. sampel yang digunakan adalah 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2018 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebanyak 27 Jadi data penelitian yang digunakan adalah 27 x 2 = 54 data. Pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik pengambilan sampel jenuh, Teknik Sampel Jenuh adalah Teknik penentukan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono,2017:85). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan mengunakan *pooled* data, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* selama periode tahun 2017 sampai dengan 2018.

 Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen Laporan Realisasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat 2017-2018. Data informasi variabel diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)), situs Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan mengunduh data dari ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa catatan catatan, dokumen, dan Laporan Realisasi APBD pada pemerintah kabupaten/kota Jawa Barat 2017-2018 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat 2017-2018.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran mengenai jumlah sampel, nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif:

**Tabel 1**

**Tabel Statistik Deskriptif**

| **Descriptive Statistics** |
| --- |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PE | 54 | .04 | .11 | .0794 | .01607 |
| PAD | 54 | 93715119 | 3397309518 | 766833428.27 | 770457708.397 |
| DAU | 54 | 368153289 | 2096677101 | 1186230931.95 | 454029281.545 |
| LW | 54 | 37 | 5027 | 1409.22 | 1268.547 |
| BM | 54 | 103132957 | 1717733020 | 569743832.45 | 420111742.931 |
| Valid N (listwise) | 54 |  |  |  |  |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

**Pengujian Data**

1. **Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:159).

**Tabel 2**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

|  |
| --- |
|  |  | Unstandardized Residual |
| N | 54 |
| Normal Parametersa | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 132970883.01309572 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .098 |
| Positive | .098 |
| Negative | -.060 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .719 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .680 |

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan table 2, diketahui nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,680 artinya nilai Kolmogrov-Sminornov > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan lolos dari uji normalitas.

1. **Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3**

| Model | Collinearity Statistics |
| --- | --- |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
| PE | .909 | 1.100 |
| PAD | .568 | 1.760 |
| DAU | .341 | 2.934 |
| LW | .410 | 2.439 |
| a. Dependent Variable: BM |

**Uji Multikolinieritas**

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan hasil tabel 3 terlihat bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation vactor* (VIF) dibawah 10. Nilai tolerance untuk variabel jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,909 pendapatan asli daerah 0,568 dana alokasi umum sebesar 0,341 dan variabel luas wilayah 0,410. Nilai VIF untuk jumlah pertumbuhan ekonomi 1,100, variabel pendapatan asli daerah sebesar 1,760 dana alokasi umum 2,934 dan variabel luas wilayah sebesar 2,439. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas.

1. **Uji Heteroskedastitas**

**Tabel 4**

**Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser**

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 53510204.040 | 63412420.272 |  | .844 | .403 |
| PE | -49417347.374 | 704920209.272 | -.010 | -.070 | .944 |
| PAD | .017 | .019 | .161 | .902 | .372 |
| DAU | .051 | .041 | .288 | 1.253 | .216 |
| LW | -12876.956 | 13291.830 | -.203 | -.969 | .337 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES |  |  |  |  |

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan output uji Glejser diatas dapat diketahui nilai signifikan dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 0,944, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,372, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,216 dan variabel Luas Wilayah sebesar 0,337. Dari keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diputuskan bahwa semua variabel tidak terindikasi adanya heterokedastisitas.

1. **Uji Autokorelasi**

**Tabel 5**

| **Runs Test** |
| --- |
|  | Unstandardized Residual |
| Test Valuea | -20609297.56381 |
| Cases < Test Value | 27 |
| Cases >= Test Value | 27 |
| Total Cases | 54 |
| Number of Runs | 32 |
| Z | 1.099 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .272 |
| a. Median |  |

**Uji Autokorelasi**

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa hasil uji *Run Test* menunjukan nilai sebesar 0,272. Artinya nilai *Run Test* > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dan lolos dari uji autokorelasi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | 289655056.499 | 111560034.997 |  | 2.596 | .012 |
| PE | -3201570928.668 | 1240150161.105 | -.122 | -2.582 | .013 |
| PAD | .468 | .033 | .858 | 14.299 | .000 |
| DAU | .103 | .072 | .111 | 1.433 | .158 |
| LW | 38274.905 | 23384.015 | .116 | 1.637 | .108 |
| a. Dependent Variable: BM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dari hasil analisis regresi linier berganda pada table 6, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut:

**Y = 289.655.056,449 – 3.201.570.928,668PE + 0,468PAD + 0,103DAU + 38.273,905LW + e**

Dari persamaan regresi yang telah disusun dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstan (a) sebesar 289.655.056,449 menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai 0 atau ditiadakan, maka nilai alokasi belanja modal adalah sebesar 289.655.056,449. Koefisien Pertumbuhan Ekomi sebesar -3.201.570.928,668 menunjukkan bahwa setiap penambahan luas wilayah sebesar 1%, maka akan diikuti oleh penurunan nilai alokasi belanja modal sebesar -3.201.570.928,668. Koefisien pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,468 menunjukkan bahwa setiap penambahan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1%, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai alokasi belanja modal sebesar 0,468. Koefisien dana alokasi umum (DAU) sebesar 0,103 menunjukkan bahwa setiap penambahan dana alokasi umum (DAU) sebesar 1%, maka akan diikuti oleh penurunan nilai alokasi belanja modal sebesar 0,103. Koefisien luas wilayah sebesar 38.273,905 menunjukkan bahwa setiap penambahan dana luas wilayah sebesar 1%, maka akan diikuti oleh penurunan nilai alokasi belanja modal sebesar 38.273,905.

**Hasil Uji (t)**

**Tabel 7**

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | 289655056.499 | 111560034.997 |  | 2.596 | .012 |
| PE | -3201570928.668 | 1240150161.105 | -.122 | -2.582 | .013 |
| PAD | .468 | .033 | .858 | 14.299 | .000 |
| DAU | .103 | .072 | .111 | 1.433 | .158 |
| LW | 38274.905 | 23384.015 | .116 | 1.637 | .108 |
| a. Dependent Variable: BM |  |  |  |  |

**Hasil Uji Signifikansi (t)**

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

**Pembahasan Hasil Analisis Data**

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal**

Hasil dari uji t untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai thitung sebesar -2.582 dengan tingkat signifikansi 0,013. Dengan menggunakan batas signifikansi atau *p-value* 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,013 < 0,05 yang berarti H1 diterima. Dengan demikian maka, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Boediono (1985) menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, PDRB perkapita menurut Badan Pusat Statistik adalah bila PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka yang menujukan tingkat kenaikan kegiatan perekonomian di suatu daerah, hal ini yang menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah dengan menambah dan memperbaiki infrastruktur yang diharapkan akan dapat terus menaikan tingkat produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, pembangunan ekonomi memiliki syarat fundamental yaitu tingkat pengadaan modal pembangunan yang harus seimbang dengan pertambahan penduduk. Dengan demikian semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi, maka biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Fiona Puspita (2013) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai thitung 128,4 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000<0,05.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Hasil dari uji t untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai thitung sebesar 14.940 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi atau *p-value* 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,000 < 0,05 yang berarti H2 diterima. Dengan demikian maka, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi didaerah tersebut yang harus selalu digencar pertumbuhannya dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah yang salah satunya untuk Belanja Modal. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pengalokasian dana ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrasturktur bisa lebih leluasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan pada suatu daerah maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi (meningkat). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin rendah (turun).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rahmi Ginting (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 5.417 Serta nilai *Pvalue* sebesar 000<0,05. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Ufi Rumefi (2018) yang menyatakan Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai thitung 7,873 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000<0,05.

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Hasil dari uji t untuk variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai thitung sebesar 1.048 dengan tingkat signifikansi 0,300. Dengan menggunakan batas signifikansi atau *p-value* 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,300 > 0,05 yang berarti H3 ditolak. Dengan demikian maka, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada provinsi Jawa Barat 2017-2018.

Sifat Dana alokasi umum yang “Block Grant” atau merupakan bentuk hibah dan bantuan sosial memungkinan daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

**Gambar 1**

**Realisasi Belanja Daerah Jawa Barat 2017**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Berdasarkan Laporan Realisasi Provinsi Jawa Barat 2017 Belanja barang dan jasa yang termasuk kedalam Belanja Operasi lebih besar rasio pengeluarannya dibandingkan dengan Belanja Modal hal ini dapat menjadi dasar bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah lebih diperuntukan untuk membiayai pengeluaran operasi dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal, ini mengapa Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dikarenakan dana alokasi umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP NO.55 Tahun 2005), Suatu daerah dengan potensi fiskalnya rendah, maka akan menerima Dana alokasi umum yang tinggi, dan sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya tinggi, maka Dana Alokasi Umum yang diperoleh daerah tersebut akan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat memiliki kemandirian dalam membiayai alokasi Belanja Modal.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Santika Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 0,320 Serta nilai *Pvalue* sebesar 0,750 > 0,05. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) yang menyatakan Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai thitung 0,671 dengan nilai signifikansi yaitu 0,885 > 0,05.

**Pengaruh Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal.**

Hasil dari uji t untuk variabel Luas Wilayah diperoleh nilai thitung sebesar 1.699 dengan tingkat signifikansi 0,096. Dengan menggunakan batas signifikansi atau *p-value* 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,096 > 0,05 yang berarti H4 ditolak. Dengan demikian maka, luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada provinsi Jawa Barat.

Hal ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota di Jawa Barat dengan luas wilayah yang besar tidak menjadi acuan akan memiliki belanja modal yang besar juga begitu pun sebaliknya, kabupaten/kota yang meiliki luas wilayah yang lebih kecil akan memilikin belanja modal yang kecil juga.

**Tabel 8**

**Tabel perbandingan Belanja Modal 2017-2018**

|  |
| --- |
| 2017 |
| Kota/Kabupaten | Belanja Modal | Luas Wilayah |
| Kota Bandung | 1,629,694,076 | 168 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 568,077,122 | 2,551 |
| 2018 |
| Kabupaten Sukabumi | 519,889,975 | 5,207 |
| Kota Bekasi | 1,296,979,425 | 207 |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Daerah 2017 dan 2018

Berdasarkan Tabel Perbanding diatas untuk 2017 dapat dilihat bahwa Kota Bandung yang dengan wilayah yang kecil seluas 168 Km2 memiliki belanja modal sebesar 1.629.964.076,17 sedangkan Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah yang cukup besar yaitu 2.551,29 memiliki belanja modal 568.077.122. Sedangkan untuk tahun 2018 luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Sukabumi dengan 5.027 Km2 dengan belanja modal sebesar 519.889.975,44 sedangkan Kota Bekasi dengan luas wilayah 206,61 dengan belanja modal yang cukup besar yaitu 1.296.979.425,24.

Bukan berarti bahwa luas wilayah tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, ada banyak faktor yang mempengaruhi. salah satunya yaitu proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota, selain itu juga memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial politik di daerah masing-masing yang memungkinan pemerintah pada daerah yang luas tidak memiliki belanja modal yang tinggi.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ainun Jariyah (2014) yang menyatakan bahwa Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 0,441 serta nilai *P-value* sebesar 0,662>0,05. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Suci Rohini (2019) yang menyatakan Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai thitung -0,327 dengan nilai signifikansi yaitu 0,744>0,05.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. 4) Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INVESTASI SWASTA DI INDONESIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, *5*(1).

Ayem, Sri dan Dessy Dyah Pratama. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol.2 No.2. p-ISSN: 2550-0376 /e-ISSN: 2549-9637

Boediono. 2010*. Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE

Ginting, Rahmi. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Riau.* Vol. 4 No. 2.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kusnandar, D. (2012). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Universitas Indonesia. Jakarta

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mudrajat Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2015 *Tentang Klasifikasi Anggaran*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 33 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.*

Putra, F. (2017). Pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.*Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol.5 No.1. 2933-2053

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang No.54 Tahun 2017 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*

Siswiyanti, Pungki. (2015).Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.*Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*. Vol.7 No.1. e-ISSN: 2502-6380

Sudika, I komang dan I Ketut Budiartha. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21 No.2. 1689-1718

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.